



BADAN KEAHLIAN DPR RI  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



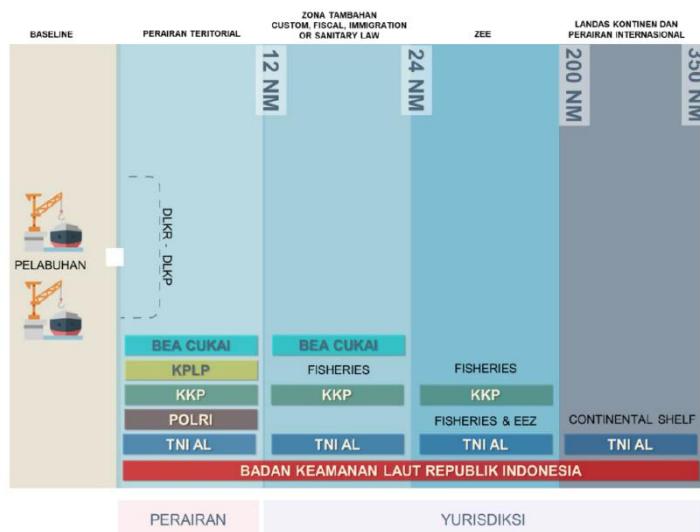
# ANGGARAN DAN OPERASI KEAMANAN LAUT BAKAMLA DI WILAYAH PERAIRAN DAN YURISDIKSI INDONESIA

20  
25

ANALISIS  
RINGKAS  
CEPAT

Wilayah laut Indonesia terdiri dari perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perairan Indonesia meliputi beberapa rezim laut yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Perairan yurisdiksi Indonesia meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas dan Kawasan dasar laut internasional<sup>1</sup> (Badan Keamanan Laut, 2023). Indonesia memiliki kepentingan di seluruh zona perairan dan yurisdiksi tersebut, mulai dari perairan pedalaman hingga laut bebas, termasuk kawasan dasar laut internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menangani berbagai dinamika di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, baik dinamika nasional, regional maupun internasional. Indonesia harus memiliki kemampuan mumpuni dalam menjalankan penegakan hukum dan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan berbagai aturan perundang-undangan, terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut Indonesia. Salah satunya adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Berdasarkan bentangan wilayah laut Indonesia, pemetaan kewenangan berbagai instansi pada zonasi wilayah laut Indonesia terlihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Pemetaan Kewenangan Pada Zonasi Wilayah Laut Indonesia

Sumber: Badan Keamanan Laut, 2023.

Bakamla memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang seluas 6,4 juta km<sup>2</sup>. Sedangkan fungsi Bakamla yaitu: Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; Memberikan bantuan pencarian dan

<sup>1</sup> Zona Tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut, yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia, dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut, yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelautan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (*isobaths*) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. Laut Bebas merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman. Kawasan dasar laut internasional merupakan dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.

pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

## PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN BAKAMLA TAHUN 2020-2025

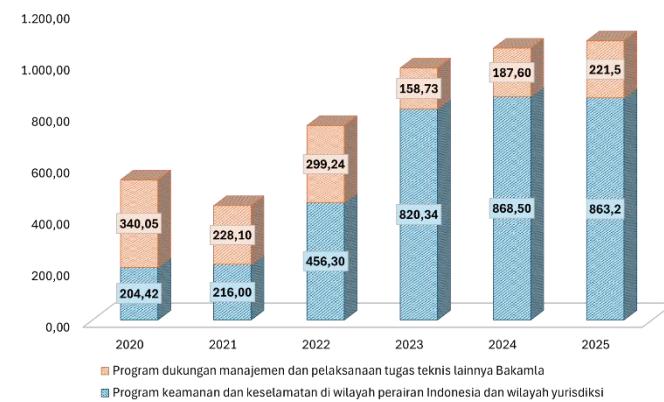
Realisasi anggaran Bakamla sepanjang 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan setiap tahun, kecuali 2021 mengalami penurunan 18,43 persen akibat kebijakan anggaran yang berfokus pada kebijakan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi pada 2020 bertumbuh 28,37 persen, pada 2022 bertumbuh 70,13 persen dan pada 2023 bertumbuh 29,59 persen dibanding tahun sebelumnya (Gambar 2).

Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rata-rata persentase realisasi anggaran sepanjang 2020-2023 sebesar 97,61 persen. Alokasi anggaran Bakamla pada 2024 sebesar Rp1.056,10 miliar, meningkat 7,87 persen dari realisasi 2023. Sedangkan untuk 2025, sebesar Rp1.084,7 miliar, meningkat 2,71 persen dari pagu alokasi anggaran 2024.

Berdasarkan program, anggaran Bakamla terdiri dari 2 program, yakni Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan Program keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi. Rata-rata persentase realisasi Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sepanjang 2020-2023 sebesar 96,20 persen. Salah satu alokasi anggaran dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu mendanai kegiatan peningkatan atau pengadaan material, sarana prasarana dan manajemen BMN Bakamla. Salah satu sub kegiatan dari kegiatan peningkatan atau pengadaan material tersebut yaitu pengadaan sarana prasarana patroli Bakamla, seperti kapal patroli dan persenjataan.

Pada 2020-2023, rata-rata porsi anggaran kegiatan peningkatan atau pengadaan material, sarana prasarana dan manajemen BMN dari total anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mencapai 47,94 persen setiap tahun. Namun pada 2023 hanya 0,37 persen dari total realisasi anggaran Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang sebesar Rp158,73 miliar. Penurunan signifikan tersebut sejalan dengan penurunan anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 46,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, alokasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp187,60 miliar, meningkat 18,19 persen dari realisasi 2023. Sedangkan untuk 2025, sebesar Rp221,5 miliar, meningkat 18,07 dari pagu alokasi anggaran 2024.

Secara umum, alokasi anggaran program keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Realisasi anggaran program untuk menjalankan operasi keamanan dan keselamatan sepanjang 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 60,91



**Gambar 2. Perkembangan Realisasi Anggaran Bakamla 2020-2024 (Miliar Rp)**

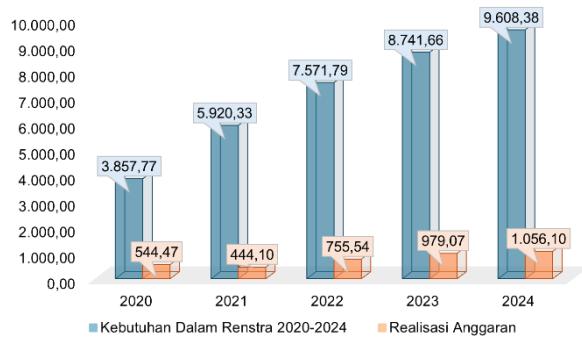
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2024, 2023, 2022, 2021) dan Kementerian Keuangan (2024), diolah.

persen (Gambar 2). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2023, yakni sebesar 111,25 persen. Alokasi anggaran program pada 2024 sebesar Rp868,5 miliar, meningkat 5,87 persen dari realisasi 2023. Sedangkan untuk 2025, alokasi anggarannya sebesar Rp863,2 miliar, mengalami penurunan 0,61 persen dari pagu alokasi anggaran 2024.

## ANGGARAN BAKAMLA: REALISASI ANGGARAN VIS A VIS KEBUTUHAN

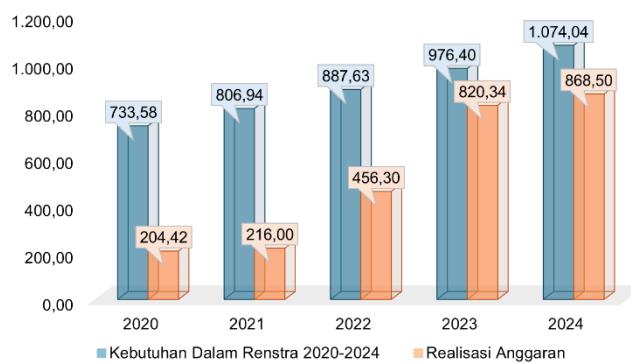
Luas wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang menjadi wilayah kerja operasi keamanan laut yang dilaksanakan Bakamla sebesar 6,4 juta km<sup>2</sup>. Luas wilayah kerja tersebut juga dijadikan sebagai referensi luas wilayah dalam perhitungan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Besarnya luas wilayah kerja operasi keamanan laut tersebut akan berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, baik untuk membiayai kegiatan operasi patroli, pemantauan maupun penyediaan sarana prasarana operasi patroli seperti kapal patroli dan persenjataan.

Dalam Rencana Strategis Badan Keamanan Laut (Renstra) Tahun 2020-2024, kebutuhan anggaran sepanjang 2020-2024 secara berurutan sebesar Rp3.857,77 miliar, Rp5.920,33 miliar, Rp7.571,79 miliar, Rp8.741,66 miliar dan Rp9.608,38 miliar (Gambar 3). Besarnya kebutuhan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, yang menjadi tanggung jawab tugas Bakamla. Apabila angka kebutuhan dalam Renstra tersebut dibandingkan dengan realisasi anggaran 2020-2023 dan alokasi anggaran 2024, kebutuhan pendanaan baru hanya 10,76 persen dapat dipenuhi dari APBN.



Gambar 3. Perbandingan Kebutuhan Pendanaan Dalam Renstra dan Realisasi Anggaran

Sumber: Badan Keamanan Laut (2023), Badan Pemeriksa Keuangan (2024, 2023, 2022, 2021) dan Kementerian Keuangan (2024), diolah.



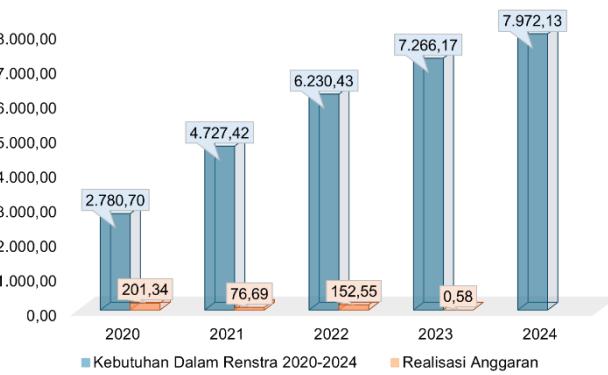
Gambar 4. Perbandingan Kebutuhan Pendanaan Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia Dalam Renstra dan Realisasi Anggaran

Sumber: Badan Keamanan Laut (2023), Badan Pemeriksa Keuangan (2024, 2023, 2022, 2021) dan Kementerian Keuangan (2024), diolah.

2024 jauh lebih besar, namun masih di bawah 100 persen kebutuhan dalam Renstra. Realisasi di 2023 masih hanya sebesar 84,02 persen dan mengalami penurunan di 2024 yakni hanya 80,86 persen dari kebutuhan dalam Renstra. Secara akumulatif, realisasi anggaran pada periode 2020-2023 tersebut hanya 37,90 persen dari total kebutuhan anggaran Bakamla untuk 2020-2024 dalam Renstra Bakamla 2020-2024.

Salah satu kebutuhan pendanaan dalam Renstra Tahun 2020-2024 tersebut diperlukan untuk membiayai operasi patroli rutin, yang dianggarkan dalam program keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi. Realisasi anggaran pada 2020-2023 hanya masih dapat memenuhi di bawah 60 persen dari kebutuhan dalam Renstra, yakni secara berurutan sebesar 27,87 persen, 26,77 persen dan 51,41 persen. Realisasi di 2023 dan alokasi di

Optimalisasi pelaksanaan operasi keamanan laut akan dapat diwujudkan apabila didukung ketersediaan sarana prasarana yang mumpuni. Dalam Renstra 2020-2024 direncanakan melakukan penambahan sarana prasarana patroli yang terdiri dari 6 unit kapal patroli 80 meter, 1 unit kapal latih 80 meter, 19 unit kapal patroli 60 meter, 29 unit *High Speed Craft* (HSC), 46 unit *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), 1 unit pesawat, 4 unit helikopter, 60 unit pistol, 840 unit senapan perorangan, 70 unit *sub machine gun*, 20 unit sniper, 56 unit senjata 12,77 mm dan 28 unit senjata 30 mm. Pengadaan sarana prasarana tersebut dialokasikan dalam rencana anggaran untuk kegiatan peningkatan atau pengadaan material, sarana prasarana dan manajemen BMN, yang secara akumulatif untuk 2020-2024 sebesar Rp28.976,85 miliar (Gambar 5). Realisasi anggaran pengadaan sarana prasarana sepanjang 2020-2023 hanya sebesar Rp431,15 miliar atau 1,49 persen dari total kebutuhan dalam Renstra.



**Gambar 5.** Perbandingan Kebutuhan Pendanaan Kegiatan peningkatan atau pengadaan material, sarana prasarana dan manajemen BMN Bakamla Dalam Renstra dan Realisasi Anggaran

Sumber: Badan Keamanan Laut (2023), Badan Pemeriksa Keuangan (2024, 2023, 2022, 2021) dan Kementerian Keuangan (2024), diolah.

**Tabel 1.** Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Alat Utama Sistem Keamanan Laut dan Persenjataan Bakamla

Uraian	Target Total 2024	Realisasi 2023	Selisih Kebutuhan
<b>Kapal/Pesawat/Helikopter</b>			
Kapal Patroli Bakamla 110 meter	1	1	0
Kapal Patroli Bakamla 80 meter	9	3	6
Kapal latih 80 meter	1		1
Patroli Bakamla 48 meter	6	6	0
Patroli Bakamla 60 meter	19		19
Patroli Bakamla 12 meter tipe Catamaran	8	8	0
Kapal Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB)	10	10	0
High Speed Craft (HSC)	29	4	25
Unmanned Aerial Vehicle (UAV)	36		36
Pesawat	1	1	0
Helikopter	4	1	3
<b>Senjata</b>			
Pistol	60	54	6
Senapan	840	266	574
Sub Machine Gun	70	41	29
Sniper	20	14	6
Senjata 12,7 mm	56	20	36
Senjata 30 mm	28	4	24

Sumber: Badan Keamanan Laut (2023, 2024), diolah.

Rendahnya realisasi anggaran dari kebutuhan dalam renstra tersebut berimplikasi pada masih besarnya gap atau selisih sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi keamanan laut yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bakamla, khususnya alat utama sistem keamanan laut/alutsikamla (Tabel 1). Selisih sarana prasarana tersebut antara lain yaitu 6 unit kapal patroli 80 meter, 1 unit kapal latih 80 meter, 19 unit kapal patroli 60 meter, 25 unit HSC, 36 unit UAV dan 3 unit helikopter.

## IMPLIKASI REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA OPERASI KEAMANAN LAUT

Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana dari APBN sepanjang 2020-2023 berdampak terhadap kinerja operasi keamanan laut. Rendahnya pemenuhan kebutuhan anggaran berimplikasi pada belum optimalnya kapasitas patroli yang dilakukan Bakamla. Kapasitas patroli menjadi salah satu indikator pada IKLN. Dalam rangka mengamankan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pemerintah Indonesia memerlukan patroli pengamanan yang rutin setiap tahunnya (Badan Keamanan Laut, 2024). Per 2023, hari patroli pesawat dan/atau helikopter sebesar 32 hari atau setara 10,7 persen dari referensi/hari patroli ideal sebanyak 300 hari<sup>2</sup>. Hari patroli kapal juga masih relatif rendah, yakni 90 hari atau 37,5 persen dari hari patroli ideal yang sebesar 240 hari sepanjang tahun.

<sup>2</sup> Menggunakan data 2022.

Tabel 2. Kapasitas Patroli Bakamla 2023

Uraian	Riil	Referensi	Percentase Riil
Hari Patroli Pesawat dan/atau Helikopter	32	300	10,7
Hari Patroli Kapal	90	240	37,5
Aset Patroli Pesawat dan/atau Helikopter	1	24	4,2
Aset Kapal Patroli	32	60	53,3
Cakupan Area Pesawat dan/atau Helikopter (km <sup>2</sup> )	1.083.909	6.400.000	16,9
Cakupan Area Kapal Patroli (km <sup>2</sup> )	3.281.800	6.400.000	51,3
Target Area yang Menjadi Prioritas Pengawasan	9	36	25,0

Sumber: Badan Keamanan Laut (2024), diolah.

kebutuhan ideal (referensi) masih di bawah 5 persen dan aset patroli kapal masih di bawah 60 persen (Tabel 2).

Keterbatasan aset patroli dan hari patroli tersebut berimplikasi pada masih relatif rendahnya cakupan area patroli, yang sebesar luas wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sebesar 6,4 juta km<sup>2</sup>. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada masih rendahnya realisasi target area yang menjadi prioritas pengawasan. Cakupan area patroli pesawat dan/atau helikopter baru 16,9 persen. Sedangkan cakupan area patroli kapan baru 51,3 persen dan realisasi target area yang menjadi prioritas pengawasan baru 25 persen (Tabel 2).

Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana dari APBN tersebut berimplikasi pada belum optimalnya kapasitas pemantauan yang harus dilakukan Bakamla. Saat ini, stasiun pemantauan yang dimiliki baru 18 stasiun atau setara 51,4 persen dari kebutuhan ideal sebesar 35 stasiun. Cakupan area stasiun pemantauan juga relatif masih rendah, yakni hanya 172.909 km<sup>2</sup> atau 2,7 persen dari 6,4 juta km<sup>2</sup> yang harus dipantau. Pembinaan masyarakat pesisir guna membantu aparat penegak hukum di laut dalam menjalankan pengawasan juga masih relatif rendah. Bakamla baru dapat melakukan pembinaan terhadap 7 kelompok binaan. Angka ini setara 17,5 persen dari jumlah ideal kelompok pembinaan yang sebesar 40 kelompok (Tabel 3).

## PERBANDINGAN ANGGARAN BAKAMLA DENGAN SEA COAST GUARD NEGARA LAIN DI ASIA TENGGARA

Di kawasan Asia Tenggara terdapat beberapa negara yang memiliki institusi *sea and coast guard* atau penjaga laut dan pantai yang berdiri sendiri atau tidak berada di bawah kementerian/lembaga lain, seperti halnya Bakamla. Negara tersebut antara lain Malaysia yang memiliki The Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA), Filipina yang memiliki The Philippine Coast Guard (PCG) dan Vietnam yang memiliki Vietnam Coast Guard (VCG). Sedangkan di Singapura, Thailand, Brunei, Myanmar dan Timor Leste, tugas penjaga laut dan pantai dilakukan sebuah unit yang berada di bawah lembaga lain atau dilakukan angkatan laut.<sup>3</sup>

Apabila membandingkan luas wilayah perairan dan yurisdiksi berdasarkan negara yang menjadi tanggung jawab *sea and coast guard* masing-masing negara, luas wilayah kerja Bakamla lebih luas dibanding dengan MMEA, PCG dan VCG. Luas wilayah kerja yang lebih luas tersebut seharusnya berbanding lurus dengan dukungan anggaran dari APBN setiap negara, personil dan kemampuan/ketersediaan alutsiskamla. Faktanya tidak demikian,

Masih rendahnya hari patroli, baik pesawat dan/atau helikopter maupun kapal, tersebut tidak terlepas dari kapasitas sarana prasarana patroli yang dimiliki Bakamla. Persentase aset patroli pesawat dan/atau helikopter yang dimiliki dibanding

Tabel 3. Kapasitas Pemantauan Bakamla 2023

Uraian	Riil	Referensi	Percentase Riil
Stasiun Pemantauan	18	35	51,4
Cakupan Area Stasiun Pemantauan	172.909	6.400.000	2,7
Pembinaan Masyarakat Pesisir dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Laut	7	40	17,5

Sumber: Badan Keamanan Laut (2024), diolah.

<sup>3</sup> Tugas penjaga pantai dan laut di Singapura berada di bawah Singapore Police Force, Thailand di bawah The Royal Thai Police, Brunei di bawah Royal Brunei Police Force. Tugas penjaga pantai dan laut di Myanmar dilakukan Myanmar Navy dan di Timor Leste dilakukan Naval component of Falintil-FDTL.

dukungan anggaran, jumlah personil dan ketersediaan alutsiskamla MMEA, PCG dan VCG relatif lebih besar dibanding Bakamla (Tabel 4).

Tabel 4. Perbandingan Anggaran dan Kekuatan Bakamla Dengan Sea and Coast Guard Negara Lain<sup>4</sup>

NEGARA	ANGGARAN DALAM RUPIAH	LUAS PERAIRAN & YURISDIKSI (KM2)	GENDARMERIE & PARAMILITARY (PERSONS)	PATROL & COASTAL COMBATANTS (UNITS)	AIRCRAFT & HELICOPTERS (UNITS)
Indonesia	1.084.700.000.000	± 6,4 juta	1.240	32	1
Filipina	8.167.181.045.600	± 3,8 juta	12.300	72	7
Malaysia	2.177.925.321.970	± 330 ribu	4.500	137	8
Vietnam	n.a	± 21 ribu	n.a	61	3

Sumber: Badan Keamanan Laut (2024), The International Institute for Strategic Studies (2023), Commision on Audit (2024), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (2024), diolah.

Alokasi anggaran Bakamla tahun 2025 sebesar Rp1,08 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding alokasi anggaran PCG di 2024 sebesar Rp8,17 triliun. Alokasi Anggaran PCG lebih besar 8 kali lipat, padahal luas wilayah kerjanya lebih kecil hampir  $\frac{1}{2}$  dari luas wilayah kerja Bakamla. Perbandingan kekuatan personil dan alutsiskamla antara PCG dengan Bakamla juga berbeda signifikan. Kepasitas kapal patroli (*patrol and coastal combatants*) dan patroli udara (*aircraft and helicopters*) PCG hampir 2,5 kali lebih besar dibanding Bakamla. Dengan VCG, alutsiskamla Bakamla lebih kecil 2 kali lipat dengan yang dimiliki VCG.

Perbandingan dukungan anggaran, personil dan alutsiskamla antara MMEA dengan Bakamla juga relatif terpaut jauh. Realisasi anggaran MMEA pada 2023 dua kali lebih besar dibanding alokasi anggaran Bakamla pada 2025, padahal luas wilayah kerja MMEA 19 kali lebih kecil dari wilayah kerja Bakamla. Alutsiskamla dan personil MMEA lebih besar 4 kali dibanding Bakamla, padahal luas wilayah kerja MMEA lebih kecil 19 kali dibanding bakamla (Tabel 4). Perbedaan dukungan anggaran, personil dan alutsiskamla tersebut berimplikasi pada perbedaan kinerja patroli yang di lakukan MMEA di wilayah perairan dan yurisdiksi Malaysia dengan Bakamla di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Pada 2023, jumlah hari patroli yang dilakukan MMEA sepanjang tahun sebesar 16.611 hari di laut (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, 2024). Jumlah hari riil patroli kapal setahun yang dilakukan Bakamla pada tahun 2022 hanya 90 hari (Badan Keamanan Laut, 2024).

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

- Realisasi anggaran Bakamla sepanjang 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahun, kecuali 2021 mengalami penurunan 18,43 persen akibat kebijakan anggaran yang berfokus pada kebijakan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun, akumulasi realisasi anggaran pada periode 2020-2023 tersebut hanya 10,76 persen dari total kebutuhan anggaran Bakamla untuk 2020-2024 dalam Renstra Bakamla 2020-2024.
- Akumulasi anggaran kegiatan peningkatan atau pengadaan material, sarana prasarana dan manajemen BMN, yang salah satunya untuk memperkuat alutsiskamla dan persenjataan, hanya hanya sebesar Rp431,15 miliar atau 1,49 persen dari total kebutuhan dalam Renstra.
- Realisasi anggaran program untuk menjalankan operasi keamanan dan keselamatan sepanjang 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahun, dengan rata-rata

<sup>4</sup> Alokasi anggaran PCG tahun 2024 sebesar PHP29.420.681.000, dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp1 = PHP277,6. Realisasi anggaran MMEA pada 2023 sebesar RM595.199.793, dikonversi dengan kurs Rp1 = RM3659,15.

pertumbuhan sebesar 60,91 persen. Namun, akumulasi realisasi anggaran pada periode 2020-2023 tersebut hanya 37,90 persen dari total kebutuhan anggaran Bakamla untuk 2020-2024 dalam Renstra Bakamla 2020-2024.

- d) Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana dalam Renstra dari APBN tersebut berimplikasi pada belum optimalnya kapasitas patroli dan pemantauan yang dilakukan Bakamla.
- e) Dukungan anggaran, ketersediaan personil, dan ketersediaan alutsiskamla yang dimiliki Bakamla lebih rendah dibandingkan MMEA, PCG dan VCG. Padahal luas wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang menjadi tanggungjawab Bakamla jauh lebih luas dibanding Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, Komisi I DPR RI perlu untuk mempertimbangkan adanya peningkatan anggaran Bakamla untuk mendukung kegiatan peningkatan atau pengadaan material, sarana prasarana dan manajemen BMN (khususnya alutsiskamla), serta pendanaan program keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada masih rendahnya kapasitas patroli dan pemantauan yang dapat dilakukan Bakamla hingga saat ini, termasuk cakupan area patroli kapal/pesawat/helikopter dan cukupan area pemantauan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. 2024. Laporan Tahunan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Putrajaya: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
- Badan Keamanan Laut. 2023. Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Revisi. Jakarta: Badan Keamanan Laut.
- Badan Keamanan Laut. 2024. Laporan Kinerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Jakarta: Badan Keamanan Laut.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2023. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2022. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Commision on Audit. 2024. *Annual Audit Report on The Philippine Coast Guard*. Manila: Commision on Audit of The Republic of Philippine.
- Parameswaran, P. 2019. *Managing the Rise of Southeast Asia's Coast Guards*. Washington, DC: Wilson Center.
- Kementerian Keuangan. 2024. Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- The International Institute for Strategic Studies. 2023. *The Military Balance 2023*. London: Routledge.

**Pengarah**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**Penanggungjawab**

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

**Penulis**

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Leo Iskandar, S.E



**2025 | ANALISIS  
RINGKAS  
CEPAT**



BADAN KEAHLIAN DPR RI  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING\*

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

**BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id)